
**DAMPAK GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI
KANTOR KEPOLISIAN RESORT BLITAR****Bagus Setyawan, Retna Safriliana, Diana Zuhroh**

Program studi Akuntansi Sektor Publik, Universitas Merdeka Malang

Email: bagusabimtd@gmail.com, retna.afriiana@unmer.ac.id, diana.Zuhroh@unmer.ac.id

Abstrak

Good Government Governance merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh sektor pemerintah. Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di tampilan dalam pencapaian kinerja sebagaimana komitmen yang telah ditetapkan. Melalui perbaikan kinerja, pemerintah dapat melakukan komunikasi dua arah dengan rakyatnya dalam rangka mencari titik temu pemecahan (Ria et al., 2021). Dalam menciptakan Good Governance memerlukan komponen yang mampu mewujudkan tata cara pengelolaan keuangan yang baik dalam mewujudkan Good Governance pada birokrasi kepolisian di kawasan Polres Blitar dan yang menjadi fokus dalam penelitian ini mengenai Transparansi, Akuntabilitas, Efektifitas dan Efisiensi dalam pengelolaan keuangan untuk mencapai Good Governance di wilayah Kepolisian Resort Polres Blitar. Dalam menciptakan Good Governance maka perlu adanya penelitian mengenai “Dampak Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan di Kantor Kepolisian Resort Blitar”. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pengaruh Transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi secara parsial terhadap pengelolaan keuangan di Polres Blitar? Dan yang menjadi tujuan penelitian ini Untuk menganalisis pengaruh Transparansi, akuntabilitas, Efektifitas dan efisiensi secara parsial terhadap Pengelolaan Keuangan di Polres Blitar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linier berganda dan diolah menggunakan software SPSS statistic 25. Dari hasil peneltian menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, efektifitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, efisiensi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Efektifitas, Efektifitas, Efisiensi.

Abstract

Good Government Governance is a demand that must be met by the government sector. The government's efforts to provide services to the community are seen in terms of performance achievement as set commitments. Through improving performance, the government can carry out two-way communication with its people in order to find common ground for solutions (Ria et al., 2021). In creating Good Governance, it requires components that are able to realize good financial management procedures in realizing Good Governance in the police bureaucracy in the Blitar Polres area and what is the focus of this research is Transparency, Accountability, Effectiveness and Efficiency in financial management to achieve Good Governance in the region. Blitar Police Resort Police. In creating good governance, there is a need for research on "The impact of good governance on financial management at the Blitar Resort Police Office". The formulation of the problem in this study is: How does transparency, accountability, effectiveness and efficiency partially affect financial management at the Blitar Police? And the aim of this study is to analyze the effect of transparency, accountability, effectiveness and efficiency partially on

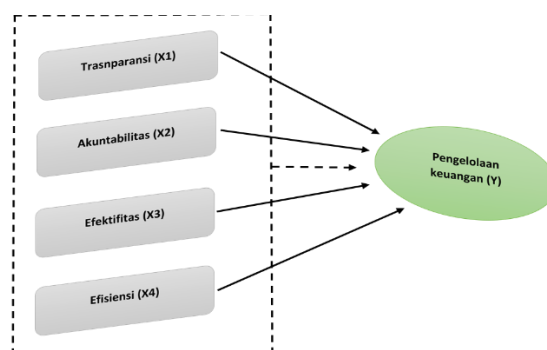
financial management at the Blitar Police. The data analysis technique used in this study is multiple linear analysis techniques and processed using SPSS statistics 25 software. The results of the study show that transparency variables affect financial management, accountability affects financial management, effectiveness affects financial management, efficiency affects financial management.

Keywords: *Transparency, Accountability, Effectiveness, Effectiveness, Efficiency.*

PENDAHULUAN

Good Government Governance merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh sektor pemerintah. Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di tampilan dalam pencapaian kinerja sebagaimana komitmen yang telah ditetapkan. Melalui perbaikan kinerja, pemerintah dapat melakukan komunikasi dua arah dengan rakyatnya dalam rangka mencari titik temu pemecahan (Ria et al., 2021). Dalam meningkatkan kepercayaan publik, Good Governance memiliki peranan yang penting dalam pencapaian kinerja keuangan yang ada di Polres Blitar. Dalam Pengelolaan keuangan berdasarkan laporan keuangan pada Kepolisian Resort Blitar dalam tiga tahun terakhir diantaranya adalah tahun 2019, 2020 dan 2021, jika tinjau dari kertas kerja DIPA tahun 2019 oleh Kepolisian Resort Blitar berjumlah Rp.85.460.233.000. Pada tahun 2020 sebesar Rp83,075,202,000 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp86.273.065.000. Dari data DIPA pada tahun 2019-2021 anggaran yang dikeluarkan sesuai kebutuhan dan program kerja yang akan direalisasikan. Namun, dalam konteks ini pengelolaan anggaran-anggaran tersebut apakah sudah memenuhi kriteria atau tidak dengan prinsip-prinsip dasar good governance.

Dari fenomena yang ada ditemukan bahwa kepolisian Polres Blitar masih kewalahan menangani anak muda yang melakukan aktifitas balap liar yang mengganggu masyarakat sekitar (www.malangtimes.com) dan ada juga fenomena yang terjadi bahwa email Kapolres Blitar telah diretas oleh orang yang tidak dikenal (www.cyber88.co.id) hal ini membuktikan bahwa ketepatan pembuatan program kerja belum direalisasi sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan. Dalam pencapaian untuk meningkatkan kepercayaan publik, Polres Blitar mengadakan kerja sama dengan LPPM UNISBA dalam survey kepuasan dan persepsi anti korupsi (surabayapagi.com) yang dimana akan sangat membantu untuk meningkatkan kepercayaan di Polres Blitar dalam pengelolaan keuangannya dalam mencapai Good Government Governance. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pengaruh Transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi secara parsial terhadap pengelolaan keuangan di Polres Blitar? Dan yang menjadi tujuan penelitian ini Untuk menganalisis pengaruh Transparansi, akuntabilitas, Efektifitas dan efisiensi secara parsial terhadap Pengelolaan Keuangan di Polres Blitar.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam membentuk kepercayaan publik terhadap polri dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya keterbukaan informasi bagi masyarakat memberi

pengaruh untuk mewujudkan kepercayaan publik yang memiliki dampak yang baik dalam terwujudnya Good Governance dalam instansi polres Blitar. Keterbukaan (Transparency) dalam berbagai informasi tentang kepolisian bagi publik dan dijamin kemudahannya dalam mengakses informasi bagi setiap orang dalam bentuk pengelolaan keuangan maupun kebijakan yang diambil akan sangat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bentuk transparansi dan memiliki dampak yang baik bagi pencitraan kepolisian yang terutama di Polres Blitar. Dalam penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan (Agustina, 20; Trisnawati 2019). Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan hipotesis yaitu:

H1: Transparansi berpengaruh positif Terhadap Pengelolaan Keuangan di Polres Blitar.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan aktifitas serta tindakan dalam program yang dilaksanakan. Dalam meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Polres Blitar maka memerlukan pertanggungjawaban yang jelas dan konsisten akan memberikan dampak dalam peningkatan pencitraan kepolisian dalam pengelolaan keuangan serta pertanggungjawabannya. Dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. (Agustina, 2020; Trisnawati). Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan hipotesis yaitu:

H2: Akuntabilitas berpengaruh positif Terhadap Pengelolaan Keuangan di Polres Blitar.

Efektifitas merupakan suatu bentuk ketepatan dalam mencapai target dan sasaran dalam program yang telah ditentukan. Dalam pencapaian target memerlukan ketetapan untuk mencapai suatu keberhasilan dalam program yang ditentukan. Dalam mencapai efektifitas pengelolaan keuangan di Polres Blitar maka dapat diukur dari ketepatan dalam mencapai tujuan bersama yang akan memberikan manfaat bagi pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan program. Efektifitas mampu menggambarkan kinerja kepolisian dalam mencapai target dan dapat memberikan suatu dampak yang baik dalam membentuk kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian di Polres Blitar. Dari penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa efektifitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan (Lisa et al., 2020; Rahman & Saputra 2022). Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan hipotesis yaitu:

H3: Efektifitas berpengaruh positif Terhadap Pengelolaan Keuangan di Polres Blitar.

Efisiensi merupakan suatu bentuk pengurangan pengeluaran anggaran dalam mencapai kehematan dalam suatu program yang akan dilaksanakan. Dalam meningkatkan efisiensi suatu program membutuhkan komponen dalam penghematannya. Dalam hal ini efisiensi menentukan realisasi yang tidak jauh dari anggaran yang ditentukan agar tidak terjadi peborosan dalam penguasaan untuk pelaksanaan Program di Polres Blitar. Dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efisiensi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan (Lisa et al., 2020; Rahman & Saputra 2022). Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan hipotesis yaitu:

H4: Efisiensi berpengaruh positif Terhadap Pengelolaan Keuangan di Polres Blitar.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini dirancang untuk dengan menggunakan penelitian eksplanatori untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam penelitian bertujuan untuk menganalisis *Good Governance* yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Efektifitas dan Efisiensi terhadap pengelolaan keuangan di polres Blitar. Dalam penelitian ini mengukur variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Efektifitas (X3) dan Efisiensi (X4) terhadap Pengelolaan keuangan (Y) dengan cara menyebarkan Kuesioner sebagai instrumen dengan menggunakan skala *likert* dan dalam pengolahannya menggunakan *Software SPSS Statistic 25*. Sumber data menggunakan data

primer, penelitian ini menggunakan sampel jenuh yang dimana semua populasi digunakan sebagai sampel sebanyak 43 responden. pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner (angket) untuk pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (√). Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis linier berganda dengan menguji validitas dan reabilitas, deskriptif, uji asumsi klasik (Normalitas, Multikolinearitas dan heterokedastisitas), uji kelayakan model, uji koefisien determination, dan Uji *t*. dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Pengelolaan keuangan α = Kostanta

X1 = Transparansi

X2 = Akuntabilitas

X3 = Efektifitas

X4 = Efesiensi

β = Koefisien regresi

e = Standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

Dalam pengujian validitas dan reabilitas bertujuan untuk memastikan instrumen yang digunakan dapat menghasilkan hasil yang akurat dan dipercaya. Berikut ini adalah hasil pengujian dari uji validitas (*case processing summary*) dan uji reabilitas (*Cronbach's Alpha*):

Tabel 1. Hasil uji Validitas

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	43	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	43	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Sumber: *Olahan SPSS, 2023*

Dari hasil uji validitas menunjukkan bahwa pada jumlah sampel (n) sebanyak 43 responden menunjukkan valid 100% artinya tidak ada data yang kosong. Sementara excluded bernilai 0 sebab tidak ada data yang dikecualikan atau semua data dapat digunakan dalam analisis.

Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,112	5

Sumber: *Olahan SPSS, 2023*

Dari hasil uji reabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar $0,112 > 0,06$. Dari hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel dinyatakan reliabel.

2. Hasil Analisis Deskriptif Variabel

Analisis deskriptif ini akan memberikan gambaran umum mengenai variabel yang terkait dengan penelitian ini. Dibawah ini adalah tabel analisis deskriptif yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Transparansi_X1	43	15	19	732	17,02	1,205
Akuntabilitas_X2	43	15	20	750	17,44	1,245
Efektifitas_X3	43	14	22	767	17,84	1,898
Efisiensi_X4	43	14	20	759	17,65	1,307
Pengelolaan_keuangan.Y	43	17	18	760	17,67	0,179
Valid N (listwise)	43					

Sumber: Olahan SPSS, 2023

Dari hasil analisis deskriptif variabel menunjukkan bahwa rata-rata terbesar ada pada variabel efektifitas (X3) sebesar 17,84 dan rata-rata terendah ada pada variabel transparansi (X1) sebesar 17,02. Dari hasil tersebut juga menunjukkan bahwa nilai minimum yang terkecil pada deskripsi variabel ada pada variabel transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) sebesar 15 dan nilai tinggi minimum ada pada variabel pengelolaan keuangan (Y) dengan nilai sebesar 17. Pada nilai maksimum dari setiap variabel menunjukkan bahwa variabel efektifitas (X3) tertinggi dengan nilai sebesar 22 dan nilai maksimum terkecil ada pada variabel pengelolaan keuangan (Y). Pada nilai standar deviasi menunjukkan nilai tertinggi ada pada variabel efektifitas (X3) sebesar 1,898 dan nilai standar deviasi terendah ada pada variabel pengelolaan keuangan (Y) sebesar 0,179.

3. Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dalam pengujian ini untuk menguji apakah data dalam berdistribusi Normal atau tidak. Berikut ini merupakan hasil dari uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		43
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,08093539
Most Extreme Differences	Absolute	,099
	Positive	,086
	Negative	-,099
Test Statistic		,099
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Olahan SPSS, 2023

Dari hasil pengujian normalitas menunjukkan hasil bahwa data berdistribusi normal dengan nilai signifikan sebarang $0,200 \geq 0,05$.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Dalam pengujian ini untuk mendeteksi apakah dalam suatu model terdapat korelasi antara variabel atau tidak ada korelasi. Berikut ini hasil uji multikolinearitas:

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Transparansi (X1)	0,973	1,028
Akuntabilitas (X2)	0,863	1,159
Efektifitas (X3)	0,868	1,152
Efisiensi (X4)	0,973	1,027

Sumber: Olahan SPSS, 2023

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Efektifitas (X3) dan Efisiensi (X4) tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi ini dengan nilai VIF ≥ 10 dan nilai Tolerance $\leq 0,10$ pada setiap variabel independen.

c. Hasil Uji Heterokedastisitas

Dalam pengujian ini untuk mendeteksi antara satu pengamat kepengamat lainnya. Berikut ini hasil pengujian dari heterokedastisitas:

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Signifikan
(Constant)	0,148
Transparansi (X1)	0,040
Akuntabilitas (X2)	0,000
Efektifitas (X3)	0,045
Efisiensi (X4)	0,010

Sumber: Olahan SPSS, 2023

Dari hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dengan menunjukkan nilai signifikan setiap variabel $\leq 0,05$.

4. Hasil Uji Kelayakan Model

Dalam pengujian kelayakan model untuk mengukur semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji Kelayakan Model

Model	F	Sig.
1	37,094	0,000

Sumber: Olahan SPSS, 2023

Dari hasil pengujian kelayakan model menunjukkan bahwa pada model ini layak untuk dilanjutkan dengan nilai signifikan $0,00 \leq 0,05$.

5. Hasil Uji Koefisien Determination (*adjusted R²*)

Pada pengujian ini bertujuan untuk melihat berapa besar persentase dari variabel dependen mampu menjelaskan Variabel Independen. Berikut hasil pengujiannya:

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determination (*R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,892	0,796	0,775

Sumber: Olahan SPSS, 2023

Dari nilai *adjusted R²* menunjukkan bahwa variabel pengelolaan keuangan (Y) mampu menjelaskan sebesar 0,775 atau 77,5% variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Efektifitas (X3) dan Efisiensi (X4) sedangkan variabel pengelolaan keuangan mampu menjelaskan 22,5% variabel independen yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

6. Hasil Uji t

Dalam pengujian bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh varian dalam variabel independen terhadap dependen. Berikut ini adalah hasil pengujian uji t:

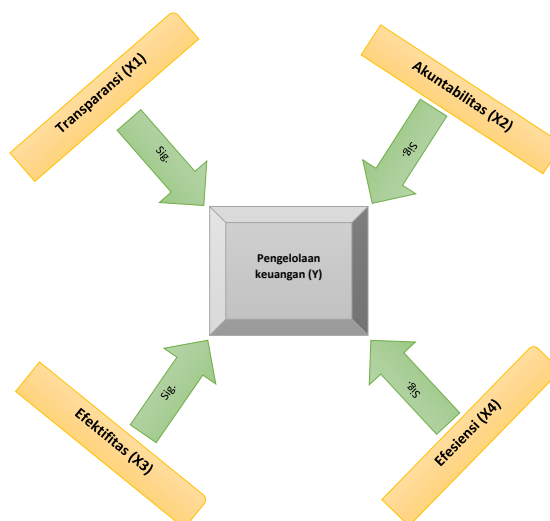
Tabel 9. Hasil Uji t

Model	T	signifikan
(Constant)	61,871	0,000

Transparansi (X1)	-9,583	0,000
Akuntabilitas (X2)	-2,360	0,024
Efektifitas (X3)	-3,275	0,002
Efisiensi (X4)	4,039	0,000

Sumber: Olahan SPSS, 2023

1. Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel transparansi (X1) berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan (Y) dengan nilai signifikan $0,000 \leq 0,05$ dengan nilai t hitung sebesar -9,583.
2. Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (X2) berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan (Y) dengan nilai signifikan $0,024 \leq 0,05$ dengan nilai t hitung sebesar -2,360.
3. Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel efektifitas (X3) berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan (Y) dengan nilai signifikan $0,002 \leq 0,05$ dengan nilai t hitung sebesar -3,275.
4. Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel efisiensi (X4) berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan (Y) dengan nilai signifikan $0,000 \leq 0,05$ dengan nilai t hitung sebesar 4,039.



Gambar 2. Hasil Uji Hipotesis

1. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan

Dalam pengelolaan anggaran, Kapolri selalu memberikan atensi arahan agar Polri juga terus berupaya tetap transparan dengan pengelolaan sistem keuangan berbasis IT melalui aplikasi Puskeu dalam pengelolaan keuangan. Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan di Polres Blitar dimana,

Polres Blitar bekerja sama dengan media dalam meningkatkan kepercayaan publik dalam keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan serta pelaporannya. Dalam penyusunan realisasi anggaran belanja Polres di Blitar juga sudah mengikuti Prinsip transparansi yang sudah di tetapkan. Dari penelitian terdahulu juga mendukung penelitian ini yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan (Agustina, 20; Trisnawati 2019).

2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan

Dalam pertanggungjawaban Polres Blitar dalam pengelolaan keuangan menunjukkan hasil kinerja yang konsisten dalam pengelolaan keuangan serta dalam pengevaluasiannya juga, hal tersebut juga sudah didukung dengan bukti transaksi serta

dokumen dalam pertanggungjawaban di Polres Blitar. Dalam penyusunan anggarannya juga Polres Blitar mengutamakan kepentingan masyarakat luas dalam menjaga keamanan dan kertertiban.

kepolisian saat ini mengalami dampak yg buruk mengenai akuntabilitasnya yang terjadi di beberapa daerah yang menurunkan kepercayaan publik, namun Polres Blitar sangat mengutamakan pertanggungjawabannya dalam banyak sektor terutama dalam pengelolaan keuangan. Polres Blitar sudah berupaya tegas dalam mempertanggungjawabkan segala tindakan para anggotanya serta dalam pengelolaan keuangan yang akan direalisasikan. Dari penelitian terdahulu juga mendukung penelitian ini dan menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. (Agustina, 2020; Trisnawati).

3. Pengaruh Efektifitas Terhadap Pengelolaan Keuangan

Dalam pencapaian kinerja Polres Blitar sudah semaksimal mungkin dalam menangani kasus yang ditargetkan seperti kasus kriminalitas yang didominasi dalam modus penipuan, pencurian disertai penjabretan, perjudian, pencurian biasa dan curanmor. Dari hal tersebut sudah bisa menunjukkan bahwa dalam perencanaan realisasi anggaran sudah mencapai prinsip efektifitas dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan terhadap masyarakat yang ada di wilayah Polres Blitar. Dari penelitian terdahulu juga mendukung hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa efektifitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan (Lisa et al., 2020; Rahman & Saputra 2022).

4. Pengaruh Efisiensi Terhadap Pengelolaan Keuangan

Dalam perencanaan anggaran yang akan direalisasikan di Polres Blitar sudah dikelola dengan baik serta terealisasi dengan maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa Polres Blitar sudah mencapai pencapaian yang baik dalam pengelolaan keuangan. Untuk terwujudnya efisiensi di Polres Blitar mewujudkan kebijakan *Zero Growth* yang dimana kebijakan tersebut untuk mengefisiensikan jumlah anggota kepolisian di Polres Blitar agar pada saat perekrutmen anggota hanya digantikan oleh anggota lama yang telah pensiun dalam masa keanggotaannya. Dalam meningkatkan efisiensi di Polres Blitar juga mengikuti perkembangan era modern dengan memanfaatkan teknologi yang ada menghemat anggaran pengeluaran seperti penggunaan Pengenalan plat nomor untuk mengetahui dimana lokasi kendaraan itu berada (*Automatic License Plate Recognition*) dan penggunaan drone yang mampu mengetahui keadaan lingkungan yang diawasi agar lebih terjaga keamanannya agar dapat mengurangi anggaran yang berlebihan dalam kegiatan operasional kepolisian di Polres Blitar. Dari penelitian terdahulu juga mendukung bahwa efisiensi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan (Lisa et al., 2020; Rahman & Saputra 2022).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Blitar sudah melaksanakan prinsip Good Governance dengan baik dalam pengelolaan keuangan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan di Polres Blitar. Polres Blitar sudah bekerja sama dengan media dalam meningkatkan kepercayaan publik dalam keterbukaan informasi dan berupaya tegas dalam mempertanggungjawabkan segala tindakan para anggotanya serta dalam pengelolaan keuangan yang akan direalisasikan. Dalam pencapaian kinerja Polres Blitar sudah semaksimal mungkin dalam menangani kasus yang sudah ditargetkan dan Dalam meningkatkan efisiensi di Polres Blitar

juga mengikuti perkembangan era modern dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk menghemat anggaran pengeluaran.

BIBLIOGRAFI

- Agustiana, V. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa pada desa gunungbatu. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1, 1–20. <https://journal.stiepasim.ac.id/index.php/JMA/article/download/113/100>
- Anom, I. G. N. A. A. P., Dewi, I. G. N. A. A. P., & Rika, N. L. (2018). Pengaruh Implementasi Good Public Governance Dan Integritas Sistem Pelayanan Unggulan Terpadu (SIPUTU) Terhadap Kinerja Kepolisian Resor Karangasem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 3(2), 209–225.
- Baharuddin. (2017). Reformasi Polri dan Pelayanan Publik dalam Perspektif Good Governance. *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, 1(1), 49– 60.
- Dwi Urip Wardoyo, Rafiansyah Rahmadani, P. T. H. (2016). Agency Theory Perspective in Implementation of Corporate Governance. *The 2nd International Multidisciplinary Conference*, 68–84. [file:///C:/Users/ACER V5/Downloads/1167-2272-1-SM \(1\).pdf](file:///C:/Users/ACER V5/Downloads/1167-2272-1-SM (1).pdf)
- Dwi, U. W., Rafiansyah R., P. T. H. (2021). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 39–43. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i1.25>
- Eisenhardt, K. M., & Eisenhardt, K. M. (2018). Linked references are available on JSTOR for this article : Agency Theory : An Assessment and Review. *Academy of Management*, 14(1), 57–74.
- Fahri, M. (2016). Analisis Transparansi Dalam Penyelenggaraan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Al-Adalah Vol. 3, Nomor I, Januari 2018:29-44*, 3, 1–23. <https://media.neliti.com/media/publications/326852-analisis-transparansi-dalam-penyelenggar-8872d7da.pdf>
<https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.77-88.2021>
- Ghozali, Imam (2011). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro*
- Hanafiah, R. R., Abdullah, S., & Saputra, M. (2016). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, kapasitas sumber daya manusia, dan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan daerah (studi di SKPK pemerintah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi*, 5(4), 77–86.
- Handayani, A. (2019). Analisis Pengaruh Corporate Perception Governance Index pada Kinerja Operasional dan Nilai Pasar Perusahaan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 01(01), 1689–1699.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara RI Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta, 2003(1), 20–28
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945. 105(3),129–133.
- Institute of Internal Auditors. (2017). Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal. The Institute of Internal Auditors., 1–45.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Yesi Mutia. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41.

- Jatmiko, B., & Damayanti, E. (2020). Dampak Good Government Governance terhadap Kinerja Value For Money Method pada Satuan Kerja -Perangkat Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1114. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p04>
- Kaban, A., Sihombing, M., & Tarigan, U. (2018). Analisis Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Pembiayaan. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 7(1), 1.
- Kemenkeu. (2004). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA. 1–61.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>
- Lisa, E. C. K., Debby, Ch. R., M. T. B. M. (2020). Analisis Kemandirian, Efektivitas, Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03), 88–98.
- Mahyuddin, & Sahri. (2022). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dan Dampaknya Terhadap Kinerja Aparatur Pemda. *Jurnal Magister Manajemen*, 11(4), 346–357. <https://doi.org/10.29303/jmm.v11i4.755>
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>
- MPR, T. (2003). Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, IX, 55. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Nubatonis, Sugeng Rusmiwari, S. S. (2014). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(3), 1288–1293. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.123>
- Paolo, Q. N. M. (2010). *Management Accounting and Control Systems* (Norman Macintosh and Paolo Quattrone (ed.); First edit). John Wiley & Sons Ltd. www.wiley.com
- Rahman & saputra. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika*, 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>
- Smulowitz, S., Becerra, M., & Mayo, M. (2019). Racial diversity and its asymmetry within and across hierarchical levels: The effects on financial performance. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602v>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA (bambang keswono (ed.)). BPK. https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386161111.pdf
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Supremasi Hukum, & Vol. (2018). *Transparansi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Menuju Good Police Governance Oleh: Arifin Ma'ruf ***. 7(1), 1–33.
- Timur pradopo. (2011). PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

www.djpp.depkmham.go.id

- Trisnawati, F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Madrasah Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(01), 1. <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i01.5436>
- Ulfah, I. F. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Panti Asuhan Al Maa'Uun. Seminar Nasional Dan Call for Paper III Fakultas Ekonomi, 216–225. [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/3723/2/T1_232009171_Ful I text.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/3723/2/T1_232009171_Ful%20I%20text.pdf)
- Umami & Nurodin. (2017). pengaruh tranparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi*, 6(11), 74–80. <http://eprints.ummi.ac.id/148/>
- Wibowo, E. (2010). Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 10(2), 129–138.
- Yatminiwati, M. (2019). Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang. *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 9(1), 10–19. <https://doi.org/10.30741/wiga.v9i1.410>.
- Zulkarnain. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. *Jurnal Publik UNDHAR MEDAN*, 3(2), 74–91.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.